

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional. Bab pendahuluan ini akan menjadi dasar (urgensi) pentingnya melakukan penelitian dengan judul : Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis multikultural (Studi Pengembangan untuk Meningkatkan Kompetensi Kewarganegaraan Global Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi di Kota Medan). Berikut deskripsinya.

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) baik dalam pengertian *citizenship education* maupun *civic education* memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan karakter bangsa baik dalam konteks nasional maupun global. Dalam konteks nasional PKn secara pedagogis adalah program kurikuler yang memiliki visi mendidik warga negara demokratis melalui pendidikan formal sebagai mata pelajaran baik di persekolahan maupun di perguruan tinggi dengan memberikan pengalaman kepada individu untuk belajar tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat yang demokratis (Winataputra, 2001; Kubow, 2017). Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki karakter Indonesia yang Pancasila yang diperkuat dengan rasa kebangsaan serta cinta tanah air.

Perkembangan PKn tampaknya tidak dapat dipisahkan dan senantiasa bersinergi dengan perkembangan pemikiran masyarakat lokal, nasional dan global. Khusus dalam konteks global, PKn lahir dan berkembang sejalan dengan adanya kecenderungan global yang diikuti gerakan demokratisasi. Gerakan ini merupakan respon terhadap perubahan yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan. Seperti gerakan sosial masyarakat yang menuntut penyelesaian isu-isu dunia yang lebih berkeadilan melalui partisipasi aktif warga negara. Karakteristik PKn dalam konteks global dicirikan dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab warga sebagai bagian dari masyarakat global dalam merespon isu-isu dunia. Tanggung jawab global dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan baik di

dalam kelas maupun di luar kelas. Karena melalui PKn para mahasiswa diajarkan sebagai warga negara yang dapat mengenali, menggali, serta mampu menyelesaikan masalah sebagai bagian dari warga masyarakat global.

Kecenderungan globalisasi membawa dampak dalam berbagai kehidupan. Globalisasi telah menciptakan ruang-ruang yang mendukung setiap warga negara untuk secara bebas mengekspresikan gagasannya melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat kita lihat bahwa globalisasi tidak hanya ketergantungan ekonomi semata, melainkan transformasi tentang ruang dan waktu dalam kehidupan manusia (Giddens, 2000 p 35). Tanpa disadari tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan berimplikasi secara global dan mempengaruhi kehidupan orang lain. Hutan yang sengaja di bakar di suatu wilayah akan berdampak terhadap lingkungan serta ekosistem sehingga menyebabkan meningkatnya emisi karbon dan berdampak pada keanekaragaman hayati (Tacconi, 2003). Pencemaran dan kabut asap yang dihasilkan tentunya berdampak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di negara lainnya Tacconi, 2003; Rasyid, 2014). Menurut Rasyid, (2014 p 47) terjadinya kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997s.d 1998, 2002 s.d 2005 telah menghasilkan kabut asap yang dirasakan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam serta mengganggu transportasi udara antar negara. Kondisi ini juga berulang pada tahun 2016 dan 2017 yang lalu. Selain itu, sebuah lagu yang dinyanyikan seseorang akan begitu cepat diikuti dan menjadi *trend* bagi anak-anak muda di negara lain. Contoh-contoh ini menunjukkan globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Arus globalisasi yang melintasi batas-batas negara akan berdampak pada lunturnya nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu bangsa (Murdiono, Sapriya, Wahab, & Maftuh, 2014 p 150). Ketidakmampuan seseorang dalam memfilter dan mengikuti trend globalisasi akan membawa pengaruh negatif bagi kehidupan. Akan tetapi jika *trend* globalisasi dimanfaatkan untuk membangun kecakapan diri, maka globalisasi menjadi sarana untuk mengedukasi warga negara dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya, orang lain, dan lingkungan pada tingkat lokal maupun global. Pengajaran dan pembelajaran ilmu sosial di era global seperti ini cenderung melakukan transformasi yang begitu cepat (Sapriya, 2014 p 49). Hal ini sangat penting untuk memperkuat eksistensi warganegara dalam menghadapi, mengatasi, bahkan menyelesaikan berbagai isu-isu global yang menjadi ancaman bagi manusia dan alam semesta.

Bila dilihat berbagai isu global non tradisional seperti terorisme dan lingkungan hidup, serta isu tradisional lainnya seperti isu keamanan global saat ini mengalami penguatan serta berdampak pada kehidupan dunia (Winarno, 2014 p xvi). Konflik yang sering terjadi di beberapa negara juga merupakan bagian dari isu global yang menyebabkan terjadinya berbagai krisis kemanusiaan. Seperti yang terjadi di Suriah, Afghanistan, Israel dan Palestina, pembantaian dan pengusiran yang terjadi pada muslim Ronghingya di Myanmar serta berbagai konflik lainnya menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, pengungsian besar-besaran, diskriminasi terhadap etnik, agama, ras, kelompok, wabah penyakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Isu kemanusiaan ini kemudian menjadi perhatian negara-negara dunia karena konflik yang terjadi mengakibatkan banyak korban jiwa khususnya pada masyarakat sipil. Hasil laporan tahunan Lembaga Internasional untuk Studi Strategis (IISS) menyebutkan akibat konflik global sepanjang tahun 2015 korban tewas telah mencapai 167.000 jiwa (<http://www.bbc.com>, 6 Mei 2016).

Menurut Bhargava (2006 p 15) sekitar 1,1 miliar orang beresiko tinggi terkena dampak dari konflik kekerasan yang terjadi dimasa mendatang. Bahkan sebagian besar konflik kekerasan yang terjadi bersifat *intra-state* (sipil) bukan *inter-state* (antar negara). Kekhawatiran ini yang kemudian dikemukakan oleh Huntington bahwa dalam dunia baru saat ini, konflik-konflik yang paling mudah dan menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya adalah konflik antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda, seperti pertikaian antar suku dan konflik antar etnis (Huntington, 2012 p 9). Hal ini juga dikemukakan oleh Jacques Delors (dalam Huntington, 2012 p 10) bahwa konflik-konflik yang terjadi dimasa yang akan datang lebih disebabkan faktor budaya daripada faktor ekonomi ataupun ideologi. Serta menjadi konflik kultural yang paling berbahaya terjadi sepanjang persinggungan antar peradaban (Huntington, 2012 p 5). Apa yang dikemukakan oleh Huntington di atas, serta melihat berbagai peristiwa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa entitas-entitas budaya sangat berpotensi memicu timbulnya konflik di suatu negara.

Selain konflik di atas, isu terorisme global juga tidak luput menjadi isu dunia yang mendapat perhatian serius. Rizal Sukma, peneliti CSIS mengemukakan bahwa tatanan dunia (*world order*) kerap kali berubah ketika terjadi *defining moment* yang dramatis (dalam Winarno, 2014 p 168). Keruntuhan WTC di Amerika Serikat (AS) sebagai *defining moment*,

telah merubah tatanan orientasi politik internasional AS serta pengaruhnya terhadap tatanan global sebagai negara *super power* (Winarno, 2014 p 168). Terorisme sebagai isu kontemporer merupakan ancaman dari berbagai kekuatan-kekuatan radikal yang berkembang dalam masyarakat. Pada zaman modern seperti saat ini bentuk kejahatan terorisme berupa pembunuhan, pemboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan serangan bersenjata (Ellis, 2007 dalam Robertson, 2007 p vii). Tidak jarang masyarakat sipil menjadi korban dalam berbagai aksi yang dilakukan. Di beberapa negara berbagai kebijakan dilakukan sebagai upaya mengatasi terorisme. Walaupun terkadang kebijakan yang dikeluarkan menuai kontroversi karena ada aspek ketidakadilan yang merugikan kelompok tertentu. Seperti di Amerika Serikat dimana ideologi politik, agama, kebangsaan, dan etnisitas sering dikaitkan dengan terjadinya kekerasan ekstrim, padahal bukan pandangan politik atau agama yang menjadikan seseorang teroris (Ellis, 2007 dalam Robertson, 2007 p vii).

Sebagai bagian dari isu dunia seruan melawan terorisme mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bagi kalangan politik dan akademik, terorisme merupakan ancaman terbesar bagi keamanan global di abad 21 (Robertson, 2007 p 3). Sebagai masalah global, pencegahan dan penanganan terorisme harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan banyak pihak. Untuk itu, setiap warga negara harus mampu mengambil peran dalam mengatasinya. Penguatan kesadaran ini diperlukan sebagai upaya menciptakan kehidupan dunia yang lebih aman dari berbagai teror dan tindakan radikal.

Selain isu kemanusiaan dan terorisme, serta lingkungan juga merupakan isu global yang menjadi perhatian dunia. Terjadinya pemanasan global yang diikuti dengan berbagai bencana alam adalah permasalahan besar yang dihadapi saat ini. Berbagai cara dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Dalam konteks internasional, penandatanganan kesepakatan melalui Ratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2007 dan 2014 adalah salah upaya mengatasi krisis lingkungan. Kesepakatan ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya mengurangi terjadinya pemanasan global. Menurut Winarno (2014 p 153) ada empat masalah serius akibat dari pemanasan global yakni (1) meningkatnya suhu bumi; (2) pola curah hujan yang tidak teratur; (3) kenaikan permukaan air laut; dan (4) pengasaman samudra. Empat isu ini kemudian menjadi fokus utama dari dampak pemanasan global yang saat ini telah mengancam kehidupan bumi dan manusia.

Terjadinya banjir baik akibat curah hujan yang tinggi maupun naiknya permukaan air laut, kekeringan akibat pola hujan yang tidak teratur ditambah suhu bumi yang semakin panas, kebakaran hutan, gunung meletus, longsor, gempa bumi yang diikuti tsunami, serta berbagai bencana alam lainnya merupakan dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Berbagai permasalahan yang timbul akibat krisis lingkungan ini adalah fenomena nyata yang saat ini menjadi ancaman bagi masa depan manusia. Berbagai kebijakan dan kesepakatan baik nasional maupun internasional yang telah dikeluarkan tentang lingkungan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh kesadaran dari setiap warga negara. Karena terjadinya krisis lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia. Studi baru baru menunjukkan bahwa aktivitas manusia selama 100 tahun terakhir telah memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dua dekade terakhir (Bhargava, 2006 p 12). Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi miliran manusia karena akan mempengaruhi produktivitas pertanian, terjadinya banjir, cuaca buruk, hilangnya keanekaragaman hayati serta dampak lainnya.

Apa yang dipaparkan di atas adalah berbagai isu-isu dunia kontemporer yang sedang melanda dunia saat ini. Walaupun masih banyak isu Global lainnya yang tampak sulit dihadapi dunia seperti kemiskinan, penyakit menular seperti Aids, flu burung, kelaparan, perubahan iklim dan polusi (Bhargava, 2006 p xiii). Atau isu Global seperti kejahatan narkoba, perdagangan manusia, feminisme dan gender, korupsi, proliferasi senjata nuklir, krisis pangan yang saat ini mengancam eksistensi manusia saat ini maupun di masa yang akan datang.

Akan tetapi berbagai isu global di atas, saat ini bukan menjadi masalah bagi satu negara atau sekelompok orang saja. Melainkan menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Kecepatan teknologi membantu seseorang di negara lain menerima berbagai informasi atas berbagai isu yang terjadi. Tidak jarang berbagai respon diberikan diberbagai negara untuk menyelesaikan isu tersebut. Apakah itu sebagai bentuk etika global melalui solidaritas sesama manusia atau sebagai perlawanan dari ketidakadilan melalui perjuangan universal.

Apapun itu, isu global adalah masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Semakin banyak orang terlibat untuk menerima tanggung jawab global maka semakin baik bagi dunia (Dower, 2008 p 39). Karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik dan damai, tanpa konflik, pelanggaran hak

asasi manusia, kemiskinan, ketimpangan sosial dan masalah lingkungan (Dower, 2000 p 553). Tanggung jawab inilah yang disebut sebagai karakteristik warga global, yaitu orang-orang yang berpikir secara global, serta secara pribadi bertanggung jawab terhadap berbagai masalah dan tantangan global yang tidak pasti (Kruempelman, 2002; Hartung, 2017). Tanggung jawab ini harus dikembangkan dalam diri siapa saja, termasuk lulusan Perguruan Tinggi melalui pendidikan yang melibatkan peserta didik untuk melayani kebutuhan komunitas baik di tingkat lokal, nasional ataupun global (Jooste & Haleta, 2017; Vander & Toukan, 2018). Karena masalah global hanya dapat dipecahkan melalui solusi global dengan partisipasi warga negara melalui institusi global (Bhargava, 2006 p xiii). Salah satu institusi yang sangat berperan menyelesaikan masalah Global adalah melalui keterlibatan Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat lembaga ini harus menempatkan fungsinya sebagai institusi yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Perguruan Tinggi tidak mendidik mahasiswa menjadi warga global, tetapi mendidik mahasiswa untuk menyadari bahwa mereka memiliki status dan kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi kebaikan dunia. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan banyaknya lulusan, melainkan bagaimana lulusan tersebut memiliki kompetensi agar dapat bersaing di abad 21 serta kesadaran sehingga mampu menggunakan pola pikir dan melihat diri mereka dalam hubungannya dengan orang lain di sekitar mereka, memiliki budaya sensitif, dan tanggung jawab sosial (Lilley, Barker, & Harris, 2017; Shiel & Jones 2016; Asrizal, Amran, Ananda, & Festiyed, 2018). Mahasiswa harus dibekali pengetahuan, sikap dan keterampilan global sehingga menghasilkan lulusan yang lebih terbuka terhadap perbedaan, memiliki keyakinan dan rasa hormat terhadap budaya sendiri dan orang lain, toleransi terhadap keragaman, dan simpati dengan penderitaan yang terjadi di tempat lain di dunia ini, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tujuan ini dapat berhasil jika pendidikan tidak hanya mendidik mahasiswa menjadi sadar secara Global, melainkan harus mampu terlibat aktif dan responsif dalam menyelesaikan berbagai isu-isu global.

Dalam konteks itu, mengapa mahasiswa harus memiliki sikap responsif terhadap berbagai isu-isu global di atas. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama*, tujuan pendidikan adalah menjadikan mahasiswa cerdas dan berperilaku baik (Lickona, 2013; Wahab & Sapriya, 2011). **Cerdas** berarti mahasiswa harus dibekali dengan sejumlah pengetahuan baik teori, konsep maupun fakta tentang berbagai isu global, serta berkontribusi melalui sejumlah pemikiran dan tindakan terhadap penyelesaian masalah tersebut. **Berperilaku baik**, yakni mahasiswa harus memiliki kesadaran, tanggung jawab serta kepedulian dalam berbagai isu global yang terjadi serta mampu mengantisipasi di masa yang akan datang. Mahasiswa merupakan bagian dari warga global, sehingga memiliki tanggung jawab terhadap kepedulian dan kesejahteraan orang lain baik di tingkat lokal, nasional maupun global (Linklater, 2002; Dill, 2012; Marino & Hayes, 2012). *Kedua*, berbagai isu-isu dunia harus di bicarakan dan didiskusikan di kelas sepertihanya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) agar para mahasiswa memiliki pengetahuan dan sikap yang utuh terhadap berbagai permasalahan tersebut serta mampu memberikan solusi konstruktif terhadap berbagai permasalahan Global.

Ketiga, perlunya menekankan kasih sayang kepada orang-orang yang tidak sebangsa, sebagai tanggung jawab personal baik pada kemanusiaan maupun lingkungan. Hal ini menunjukkan mahasiswa adalah bagian dari komunitas masyarakat yang besar dan heterogen yang mampu hidup berdampingan, bekerjasama, saling menghormati, menghargai, dan menerima, perbedaan-perbedaan budaya (Cogan dan Derricott, 1998 p 116, yang dikutip dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008 p 39-40). *Keempat*, kemampuan memahami isu-isu global adalah upaya untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan multidimensional atau kompetensi kewarganegaraan di abad 21. Kompetensi kewarganegaraan global tersebut seperangkat pengetahuan, sikap dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkan warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Beberapa alasan di atas menunjukkan betapa pentingnya mahasiswa memiliki peran dalam memahami berbagai isu dunia sehingga menumbuhkan kompetensi kewarganegaraan global (*global citizenship*). Pentingnya mendidik anak muda dalam hal masalah keadilan sosial seputar ras, etnis, agama, keragaman budaya dan kesetaraan adalah bagian penting dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Haigh, Murcia, & Norris, 2014 p 600). Di Amerika Serikat upaya memperkuat tanggung jawab global telah dilakukan dan menjadi kompetensi

yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Hal ini dikemukakan oleh Humphreys dan Davenport, (2005) yang dikutip oleh Musil (2009) bahwa setidaknya tiga kemampuan yang harus dipelajari mahasiswa di kampus, yakni :

(1) toleransi dan menghargai orang lain dengan latar belakang, ras, etnis, dan gaya hidup yang berbeda; (2) **memperluas kesadaran global dan budaya tanggap** (*sensitive*); serta; (3) menghargai peran sebagai warga negara dan memiliki orientasi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Dari ketiga kompetensi di atas terlihat kesadaran global dan budaya tanggap (*sensitive*) adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh para mahasiswa di perguruan tinggi. Sejak *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan diminta merumuskan sebuah agenda perubahan global, maka peran pendidikan dalam memberikan kontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan semakin cukup jelas (WCED, 1987 p 9). Pendidikan di abad 21 mensyaratkan belajar tidak hanya dibatasi oleh isu lokal maupun nasional. Sekolah atau universitas harus membuka cakrawala peserta didik dalam konteks yang lebih luas (Global). Karena pemahaman yang diikuti kesadaran yang lebih luas, akan memungkinkan warga negara melakukan keterhubungan secara global (Chandra, 2007 p 28). Walaupun tidak mendukung sepenuhnya paham kosmopolitan, setidaknya institusi pendidikan mengajarkan peserta didik (mahasiswa) bagaimana melihat dunia yang berbeda serta menciptakan dunia yang lebih baik, toleran, adil dan damai. Untuk itu di beberapa negara saat ini, para pendidik telah semakin sadar bahwa kita tinggal dalam masyarakat global dan sekolah harus menyiapkan peserta didik menjadi warga Global yang aktif (Musil, 2009; Dill, 2012). Karena salah satu dinamika globalisasi yang paling penting adalah keberadaan individu sebagai warga global yang disesuaikan dengan proses globalisasi (Göğebakan & Yildiz, 2018 p 437). Warga global aktif diindikasikan dengan sikap responsif yang diikuti dengan tindakan dalam menyelesaikan berbagai masalah Global. Walaupun tindakan itu hanya bagian kecil dari proses penyelesaian masalah dunia, akan lebih baik jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak melakukan apa-apa sekalipun. Karena warga Global yang aktif dan bertanggung jawab dicirikan sebagai:

Tabel 1.1 : Elemen Kunci untuk Tanggung Jawab Kewarganegaraan Global.

<i>Pengetahuan dan Pemahaman</i>	<i>Keterampilan</i>	<i>Nilai dan Sikap</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Keadilan dan Keadilan Sosial</i> • <i>Perbedaan Globalisasi dan Ketersalinghubungan</i> • <i>Pembangunan Berkelanjutan</i> • <i>Damai dan Konflik</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kemampuan berpikir kritis</i> • <i>Mampu berdebat secara efektif</i> • <i>Mampu menantang ketidakadilan dan ketidaksetaraan</i> • <i>Menghormati orang lain</i> • <i>Kerjasama dan resolusi konflik</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rasa identitas dan harga diri</i> • <i>Empati</i> • <i>Komitmen terhadap keadilan dan keadilan sosial</i> • <i>Nilai dan peduli terhadap perbedaan</i> • <i>Kepedulian terhadap lingkungan dan komitmen untuk berkelanjutan</i> • <i>Percaya bahwa setiap orang berbeda</i>

(Catalano, 2013 di adaptasi dari <http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/key-elements-of-global-citizenship>)

Elemen penting kewarganegaraan global yang dikemukakan oleh Oxfam, (2006) dan Catalano (2013) di atas adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkontribusi untuk pengembangan warga global yang berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan visi universal pendidikan tinggi yakni mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Visi ini harus didukung melalui proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa memiliki kompetensi kewarganegaraan global.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di PT. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara demokratis, yakni warga negara yang baik dan cerdas serta memanfaatkan kecerdasannya untuk kemajuan diri dan lingkungannya (Wahab & Sapriya, 2011 p 35). Lingkungan yang dimaksud tidak hanya dibatasi oleh lokal maupun nasional, akan tetapi lingkungan yang jauh lebih luas yakni global. Dalam kaitannya dengan lingkungan global inilah, PKn sering disebut sebagai Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKnG). Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKnG) telah memiliki kedudukan yang sejajar dengan pendidikan lainnya dalam kerangka pendidikan internasional. Hal ini dikemukakan oleh Rapoport, (2010 p 180, dalam Catalano, 2013 p 277) menjelaskan bahwa :

Meskipun istilah 'Pendidikan Kewarganegaraan Global' sering digunakan dalam berbagai konferensi akademik, serta wacana pendidikan, akan tetapi kita tidak

Surya Dharma, 2020, *MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL BERBASIS MULTIKULTURAL*, Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menemukan kesepakatan tentang maknanya (hal. 180). Akan tetapi istilah PKn global sering dikonseptualisasikan dalam kerangka pendidikan internasional, pendidikan global (Davies et al., 2005), pendidikan multikultural (Banks, 2004; Dunn, 2002), pendidikan perdamaian (Smith dan Fairman, 2005), pendidikan hak asasi manusia (Gaudelli dan Fernekes, 2004) atau pendidikan ekonomi '.

Apa yang dikemukakan oleh Rapoport di atas menjelaskan bahwa PKn dalam konteks global memiliki peran strategis dalam kerangka pendidikan internasional. Hal ini sejalan dengan tujuannya sebagai salah satu pendidikan yang berkontribusi dalam mendidik orang-orang agar memiliki tanggung jawab akan berbagai masalah global. Di tengah berbagai permasalahan global yang mengancam kehidupan manusia di masa depan, PKn global adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membendung dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi melalui keterlibatan aktif warga negara. Dengan demikian membangun warga yang aktif dan berpengetahuan adalah bagian utama dari kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan dan mempertahankan demokrasi (Reichert & Print, 2017 p 1). Hal ini akan berdampak pada semakin banyak orang yang datang untuk menerima tanggung jawab global, maka semakin baik bagi kehidupan dunia (Dower 2008, p 39).

Sekaitan dengan itu, Dill, (2012) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKnG) merupakan proses pendidikan yang menuntut komitmen moral dan empati peserta didik diluar kepentingan individu. Komitmen moral dan empati yang dimaksud adalah upaya membekali peserta didik agar hidup menjadi manusia yang mampu menerima dan menghargai perbedaan budaya, serta menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang tidak sebangsa untuk keberlanjutan masa depan dunia. Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKnG) akan menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik dengan membangun wawasan sebagai bagian dari warga dunia, sehingga menimbulkan sensitivitas dan kesadaran global (*global awarness*) terhadap berbagai isu-isu global. Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKnG) sebagai kendaraan untuk mengembangkan keterampilan, nilai - nilai dan sikap peserta didik sehingga mereka dapat bekerja menuju resolusi yang saling berhubungan tantangan yang dihadapi dunia saat ini (Hatley, 2019 p 87). Atau dalam istilah yang paling mulia dapat dikatakan sebagai komitmen yang dibuat oleh pendidik untuk mempersiapkan para siswa agar mendapatkan kesempatan untuk menempatkan diri mereka sebagai warga negara dalam komunitas global

Surya Dharma, 2020, *MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL BERBASIS MULTIKULTURAL*, Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Nicol, 2016 p 46). Sementara itu Reysen, Larey, dan Katzarska-Miller, (2012) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKnG) didefinisikan sebagai bentuk kesadaran, kepedulian, merangkul keanekaragaman, mempromosikan keadilan sosial dan keberlanjutan, dan rasa tanggung jawab untuk bertindak.

Begitu pentingnya PKnG dalam pendidikan, Unesco (2015) menyatakan bahwa PKnG penting dibelajarkan pada peserta didik di semua tingkatan dari *pre-primary & lower primary* (usia 5-9 tahun) sampai *upper secondary* (usia 15-18+) atau dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya bagaimana PKn global dalam konteks Perguruan Tinggi di Indonesia. Perguruan Tinggi di Indonesia mengenal mata kuliah PKn sebagai mata kuliah wajib (Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah ini bertujuan mengantarkan mahasiswa untuk memiliki sejumlah kompetensi yakni :

Seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi Filsafat Pancasila, menerapkan Konstitusi Negara dalam kehidupan sehari-hari, serta Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia (Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang kompetensi lulusan PKn).

Sebagai bagian sistemik dari sistem pendidikan nasional, PKn bertujuan untuk pengembangan kemampuan warga negara, pembentukan watak serta pencerdasan bangsa, sehingga menghasilkan warga negara yang demokratis, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Winataputra, 2001). Tujuan ini merupakan tujuan ideal dari PKn dalam konteks pendidikan nasional. Sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, mata pelajaran ini memiliki tempat yang strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia (Wahab & Sapriya, 2011 p 279). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, PKn masih mengalami berbagai permasalahan. Winataputra (2001, p 3) mengidentifikasi beberapa masalah esensial PKn di Indonesia sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan rentan akan pengaruh perubahan dalam kehidupan politik, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakajegan dalam sistem kurikulum dan pembelajaran;
2. Pendidikan Kewarganegaraan cenderung teralu memihak pada tuntutan formal kurikuler di sekolah akan tetapi kurang memperhatikan pengembangan PKn

- sebagai bagian dari bidang kajian disiplin ilmu. Hal ini yang menyebabkan epistemologis PKn kurang berkembang dengan pesat;
3. Pengalaman P4 menunjukkan bahwa program PKn di masyarakat cenderung masih berubah fungsinya menjadi indoktrinasi ideologi negara, sehingga mengabaikan visi, misi dan strategi pendidikan demokrasi;
 4. Tidak kokohnya dan tidak koherennya landasan ilmiah PKn sebagai program pendidikan demokrasi.

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan PKn dan pelaksanaannya di Indonesia. Faktor-faktor ini yang kemudian mempengaruhi jati diri PKn di Indonesia pada titik “**minimal**” yang lebih mencerminkan *education about citizenship* (Kerr 1999, p 16). Pendidikan Kewarganegaraan pada titik minimal didefinisikan secara sempit, hanya mewedahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarga-negaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, mentitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur (dalam Winatapura & Budimansyah 2007, p 6). Pendidikan Kewarganegaraan pada titik “minimal” kurang mendorong peserta didik untuk terlibat dalam situasi sosial yang lebih luas dan kompleks.

Pendidikan Kewarganegaraan pada titik “minimal” lebih didominasi pada konsep parenialis dan essensialis, sehingga kurang memperhatikan konteks sosial-rekonstruksialis. Hal ini mempengaruhi lemahnya partisipasi peserta didik untuk merespon berbagai realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk dalam konteks global. Lemahnya partisipasi masyarakat ini, dicirikan sebagai bentuk kewarganegaraan konvensional dimana partisipasi yang dilakukan oleh warga negara cenderung melalui prosedur formal demokrasi (Torney-Purta et al, yang dikutip McCowan, 2009, p 7). Bukan berasal dari kesadaran individu yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk terlibat melalui partisipasi aktif menyelesaikan berbagai isu kewarganegaraan. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran di semua tingkatan kurang mendukung pengalaman belajar (*learning experience*) yang mengaktifkan, sehingga pembentukan warga negara demokratis yang terdidik masih jauh dari yang diharapkan. Pembelajaran yang sangat terikat pada isi dan tuntutan kurikulum, kurang mengakomodasi keterlibatan dan partisipasi peserta didik dalam permasalahan kemasyarakatan.

Dalam dimensi **sosio pedagogis** Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia masih dibingkai dalam bangunan kognitif, serta kurang menyentuh visi mendidik warga negara memiliki kesadaran dan tanggung jawab global secara luas. Hal ini kemudian mempengaruhi

Surya Dharma, 2020, *MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL BERBASIS MULTIKULTURAL*, Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dimensi **formal-pedagogis**, dimana PKn di berbagai jenjang pendidikan belum secara maksimal mencapai tujuan PKn global sebagai upaya mendukung penguatan kompetensi kewarganegaraan global, termasuk di Perguruan Tinggi. Pembelajaran di dalam kelas cenderung kaku dan tidak berani keluar pada konteks sosial yang lebih luas dan kompleks.

Dari berbagai permasalahan di atas, terlihat bahwa PKn di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pengembangan kompetensi kewarganegaraan global sebagai muara akhir Pendidikan Kewarganegaraan Global (PKnG). Begitu juga di Perguruan Tinggi, bahwa PKn yang diajarkan pada semua program studi tidak dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan interdisipliner untuk memecahkan berbagai permasalahan kemasyarakatan, termasuk dalam konteks global. Jika mengutip hasil penelitian Goren & Yemini (2017, p 178) yang mengkaji pendapat para ahli tentang mengapa kewarganegaraan global sulit dibelajarkan di sekolah, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya :

1. Samar-samarnya pemikiran siswa tentang kewarganegaraan global, bisa jadi karena para pendidik tidak memiliki sumber daya atau kurang memahami gagasan ini. Serta adanya kecenderungan untuk menghindari isu-isu sensitif dan kontroversial. Hal ini menjadikan pemahaman terhadap kewarganegaraan global menjadi sempit (Niens, U., O'Connor, U., & Smith, A. (2013) dalam Goren & Yemini (2017, p 178)
2. Para pendidik khawatir terjadinya politisasi dari Pendidikan Kewarganegaraan Global. Untuk itu mereka lebih cenderung memahaminya sebagai konstruksi yang terpisah atau pasif, daripada menjadi bagian integral dari identitas mereka (Law 2007, Rapoport, 2010 dalam Goren & Yemini (2017, p 178)). Pendapat ini di dukung oleh Myers (2008) dalam Goren & Yemini (2017, p 178) bahwa para guru merasa enggan untuk menyentuh materi yang dianggap menjadikan peserta didik tidak patriotik.

Hasil penelitian Goren & Yemini (2017, p 178) di atas dapat dijadikan rujukan mengapa PKn di Indonesia kurang memperkuat pengembangan tanggung jawab global mahasiswa. **Pertama**, pembelajaran yang terikat pada isi dan kurikulum menyebabkan pendidik (guru atau dosen) “kurang berani” mengajar keluar dari konteks yang lebih luas, termasuk menghindari untuk mengkaji isu-isu yang bersifat sensitif atau kontroversial dalam kelas PKn. Apalagi isu tersebut berkaitan tentang konflik antar etnis seperti konflik Muslim Ronghinya di Myanmar, konflik Palestina, dsb. **Kedua**, pengalaman sejarah PKn yang cenderung indoktrinatif serta kurang memperhatikan visi pendidikan demokrasi, menyebabkan pendidik enggan menyentuh materi-materi yang menyebabkan para

mahasiswa tidak nasionalisme. **Ketiga**, sebagian pendidik PKn cenderung beranggapan bahwa apa yang ada dalam PKn saat ini sudahlah final, sehingga dianggap kurang perlu mengeksplorasi peran PKn dalam konteks yang lebih luas (Global). Padahal tantangan dan permasalahan setiap zaman selalu berubah dan berbeda. **Keempat**, sebagian besar pendidik kurang memahami esensi PKn dalam orientasi global, sehingga visi dan misi Kewarganegaraan global menjadi samar dan sempit.

Keempat permasalahan di atas, menyebabkan PKn di Indonesia kurang mendukung secara optimal pengembangan wawasan peserta didik sebagai bagian dari warga dunia (global). Padahal jika peran ini diperkuat, akan menciptakan lulusan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan masa depan dunia yang lebih baik. Karena untuk memahami berbagai dinamika isu global, perlu kiranya memperkuat kompetensi ini ke dalam kurikulum PKn di Indonesia. Hal ini dilakukan agar memiliki kejelasan dalam melaksanakan peran untuk menumbuhkan tanggung jawab global. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab global yang dimaksud adalah tanggung jawab terhadap keberlangsungan (*sustainability*) kehidupan dunia yang lebih baik, aman, damai yang bersumber pada jati diri bangsa sehingga tetap memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia. Tidak bersifat kosmopolit yang dapat mengancam nasionalisme, serta terjadinya homogenisasi kultural (Kalidjernih, 2009 p 42).

Walaupun secara formal pedagogis Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi kurang menyentuh pengembangan kompetensi kewarganegaraan global, akan tetapi sering terlihat beberapa aksi solidaritas yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai respon terhadap isu global. Secara umum ada dua isu yang sering menarik perhatian untuk direspon. **Pertama**, isu berkaitan dengan krisis lingkungan (*the issue of environmental crisis*). **Kedua**, isu berkaitan tentang kemanusiaan seperti konflik, kelaparan, pelanggaran hak asasi manusia serta berbagai isu lainnya. Kedua isu ini menjadi perhatian, karena dampaknya dirasakan secara langsung baik fisik maupun emosional.

Terjadinya pemanasan global yang menyebabkan kekeringan, banjir, pencemaran air, hujan asam, naiknya suhu bumi, gagalnya hasil pertanian, dan sebagainya adalah dampak fisik yang dirasakan secara langsung oleh warga negara akibat terjadinya krisis lingkungan. Isu ini kemudian menjadi perdebatan alot yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan (Winarno 2014, p 147). Isu lingkungan kemudian direspon oleh semua kalangan termasuk

mahasiswa melalui berbagai gerakan sosial baik individu maupun kelompok untuk mengkampanyekan peran pentingnya kepedulian menjaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

Selain lingkungan, masalah kemanusiaan seperti konflik, kelaparan, pelanggaran hak asasi manusia adalah berbagai isu global yang menjadi perhatian mahasiswa. Walaupun dampak dari isu tidak dirasakan langsung, akan tetapi ada pengaruh emosional atas penderitaan yang dialami dari konflik yang terjadi. Serta memberi dampak adanya sikap saling ketergantungan bagaimana kita merespon penderitaan manusia (Hite dan Seitz, 2012 p 1). Biasanya dampak secara emosional akan menjadi lebih besar, apabila korban dari isu tersebut memiliki kesamaan etnisitas. Seperti konflik yang menyebabkan pelanggaran HAM yang terjadi pada muslim Rohingnya di Myanmar, Palestina, Suriah, Aleppo, dan lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai aksi solidaritas untuk mencegah terjadinya konflik serta memberi bantuan untuk meringankan penderitaan yang dialami. Akan tetapi dalam berbagai gerakan sosial yang dilakukan dalam merespon isu kemanusiaan lebih “didominasi” oleh mahasiswa yang memiliki kesamaan etnisitas. Dalam hal ini jika korban konflik adalah masyarakat sipil yang beragama muslim maka gerakan sosial yang dilakukan lebih cepat direspon oleh mahasiswa muslim atau berbagai ormas Islam lainnya. Walaupun tidak jarang aksi solidaritas yang dilakukan di luar etnis yang sedang mengalami konflik, akan tetapi jumlahnya tidak tersebar dan sebesar dari kelompok yang merasa memiliki ikatan kultural yang sama. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Oxley (2011 p 3) bahwa Orang cenderung untuk berempati ke tingkat yang lebih dekat dengan mereka, misalnya anggota keluarga, anggota kelompok utama mereka, teman dekat, dan orang-orang yang memiliki masalah pribadinya mirip dengan mereka. Mereka juga cenderung lebih berempati dengan korban dalam situasi langsung yang memiliki kesamaan terhadap dirinya.

Apa yang dikemukakan oleh pendapat (Oxley, 2011 p 3) ini serta di perkuat oleh beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa kesadaran global pada isu-isu kemanusiaan dari konflik yang lebih bersifat etnisitas lebih cepat mendapat tanggapan dari orang-orang yang memiliki ikatan identitas yang sama. Padahal isu kemanusiaan harus direspon oleh semua pihak dengan tidak memandang perbedaan etnisitas, karena setiap orang harus berpegang teguh serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, tanpa membedakan etnisitas. Padahal empati adalah "perekat sosial" yang membuat masyarakat berfungsi secara

keseluruhan yang kohesif. Tanpa empati tidak mungkin kita membayangkan kehidupan sosial dan organisasi masyarakat yang dapat berjalan mencapai sebuah tujuan yang lebih baik (Oxley, 2011 p 3).

Contoh di atas merupakan sebagian kecil dari beberapa peristiwa global dimana kepedulian mahasiswa “masih” dipengaruhi oleh identitas, ikatan kultural, perasaan senasib yang sama. Ada beberapa faktor yang dapat dijelaskan mengapa kondisi ini dapat terjadi. **Pertama**, berbagai konflik etnis yang terjadi di Indonesia serta pengalaman masa lalu akan merubah persepsi seseorang. Karena manusia biasanya menarik kesimpulan dari apa yang ia lihat, dengar dan rasakan (Vincent, 1997 p 35). **Kedua**, adanya kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya, perbedaan nasib dan pengalaman sejarah lalu, akan mengakibatkan terjadinya sosialisasi kebencian yang berlangsung di seluruh pranata sosial di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi politik, dan sebagainya) (Budimansyah, 2010 p 8). **Ketiga**, konflik global yang diakibatkan oleh perbedaan kultural, sangat memungkinkan terjadinya “perang identitas” dan membawa redefinisi secara eksklusif yakni “kita dan mereka”, serta mengakibatkan kebencian sosial dan menguatnya kohesi dan komitmen para kelompok (Huntington, 2012 p 497). **Keempat**, Indonesia sebagai bangsa yang besar dibentuk atas dua karakteristik kebangsaan yakni obyektif dan subyektif. Karakteristik obyektif adalah bangsa yang dibentuk karena adanya wilayah teritorial, sejarah dan struktur ekonomi. Sedangkan karakteristik subyektif yakni bangsa yang dibentuk berdasarkan kesadaran (*conscioness*), kesetiaan (*loyalty*) dan kemauan (*will*) (Wright, 1942; Rustow, 1992 yang dikutip oleh Pelly, 2015 p 10). Terjadinya redefinisi “kita dan mereka” di Indonesia, tidak terlepas dari faktor sejarah terbentuknya bangsa berdasarkan karakteristik obyektif (wilayah, sejarah, bahasa, agama, pemerintahan sendiri dll), yang hanya memajukan perasaan kebangsaan (*nationhood*). Hal ini akan semakin berbahaya jika melahirkan perasaan etnosentrisme atau primordialisme yang mengukur segala sesuatu dari kepentingan etnik dan kelompok primordialnya (Pelly, 2015 p 12). Seharusnya karakteristik subyektif lebih penting dan menentukan kesatuan dan kekukuhan suatu bangsa (Jhon Stuart Mill, dalam Pelly 2015 p 10). Karena bangsa adalah solidaritas besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dibuat dan yang masih ingin terus dibuat, dan bangsa adalah jiwa, prinsip dan spiritual (Renan, 2002).

Beberapa faktor di atas dapat dijadikan rujukan untuk menjelaskan adanya kecenderungan bagi individu atau kelompok melihat realitas sosial masih dipengaruhi perbedaan etnisitas. Termasuk realitas sosial dalam konteks global, dimana kesadaran untuk merespon berbagai isu global tidak terlepas dari adanya kesamaan ikatan kultural. Jika hal menjadi proses pembiasaan, maka akan berpotensi mempengaruhi persepsi seseorang dan memungkinkan terjadinya konflik. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang bersumber pada Pancasila sebagai Kaidah Fundamental Bangsa Indonesia. Pancasila menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai setiap manusia tanpa membedakan suku, bahasa, dan agama. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menghadapi realitas sosial baik dalam konteks lokal, nasional maupun global. Hal ini diperlukan untuk menghadapi dunia yang semakin global, sehingga dapat memperkuat karakteristik kewarganegaraan multidimensional yang dicirikan dengan :

(1) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global; (2) Kemampuan bekerjasama dengan yang lain secara kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat; (3) Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; (4) Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis; (5) Keinginan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan; (6) Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia; (8) Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. (Cogan & Derricott 1998:116)

Dari sejumlah karakteristik kewarganegaraan multidimensional di atas terlihat bahwa kemampuan untuk bekerjasama, sikap sensitifitas, memahami, menerima dan menghargai perbedaan budaya adalah bagian dari kompetensi yang ditekankan pada warga negara dalam konteks global. Karakteristik ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga harus diperkuat melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk itu Perguruan Tinggi harus mampu memodifikasi strategi pengajaran agar membuat mahasiswa lebih responsif terhadap ras, etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda (Au, 2006; Gay, 2000; González, Moll, & Amanti, 2005 yang dikutip dalam Banks, 2008), khususnya sikap responsif dalam memahami permasalahan global. Dengan demikian maka dibutuhkan sebuah proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu merubah pandangan-pandangan *sterotipe* mahasiswa terhadap perbedaan budaya serta kesadaran dalam merespon berbagai isu

lingkungan. Apalagi Indonesia memiliki nilai-nilai kultural yang dapat dijadikan pondasi dalam membangun tanggung jawab global mahasiswa. Tanggung jawab global yang dimaksud adalah tanggung jawab yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang telah lama ada dan bertransformasi menjadi budaya nasional yang dapat memperkuat identitas nasional bangsa. Pengembangan tanggung jawab global ini sebagai upaya untuk tetap memperkuat peran warga negara sebagai bagian dari warga dunia (global) akan tetapi tidak meninggalkan atau lupa dari akar budaya sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dengan demikian ada harmonisasi antara nilai-nilai identitas nasional dan kosmopolitan. Karena ada sejumlah area di mana seseorang bisa menjadi kosmopolitan dalam pandangan mereka, seperti dengan mengadopsi moral tertentu (seperti ekonomi atau budaya tertentu) (Kleingeld 1999, dikutip dalam Rizvi, 2009 p 255). Hal ini nantinya akan mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab terhadap diri, orang lain maupun masyarakat yang lebih luas. Upaya memperkuat tanggung jawab global tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan model pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural (MPPKnGM)

Ada beberapa alasan pentingnya melakukan penelitian model pengembangan pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural (MPPKnGM) di perguruan tinggi.

1. Pembelajaran PKn saat ini belum menyentuh pengembangan kompetensi kewarganegaraan global.
2. Pengembangan model PKn global berbasis multikultural berupaya menghilangkan prasangka, stereotipe, etnosentrisme, rasisme dan diskriminasi terhadap perbedaan budaya baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global.
3. Nilai-nilai kemajemukan dan keanekaragaman dalam masyarakat multikultural dianggap ampuh mengikat tanggung jawab serta kesadaran global mahasiswa sebagai bagian dari warga negara global. Setiap komunitas di masyarakat (etnis, agama, daerah) pasti memiliki nilai-nilai luhur yang dianggap baik serta dijadikan aturan dan norma sosial. Nilai-nilai ini yang kemudian mengikat masyarakat dalam sebuah komunitas dan menjamin mereka untuk hidup damai, harmonis, bersahabat, saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya bagaimana nilai-nilai luhur ini kemudian dijadikan sebagai kekuatan dalam membangun watak kewarganegaraan mahasiswa.

4. Melalui penguatan nilai multikultural, penggunaan model ini diharapkan tetap memperkuat identitas nasional mahasiswa sebagai bangsa Indonesia, serta berupaya menepis paham individual dan universal sebagai prinsip kewarganegaraan kosmopolitan.
5. Saat ini belum pernah ada yang mengembangkan model PKn global di perguruan tinggi di Indonesia, sehingga perlu kiranya penelitian dan pengembangan model ini.

Berangkat dari beberapa alasan di atas, maka sangat wajar bila penelitian ini mengkaji tentang pengembangan model pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural (MPPKnGM). Multikultural menekankan kesederajatan kebudayaan serta mengusung semangat hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan budaya yang ada. Penghormatan dan pengakuan atas perbedaan bukan hanya pada lingkup nasional saja, akan tetapi lingkup global melalui respon yang diikuti dengan sikap tanggung jawab untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global. Kesadaran sosial dalam masyarakat multikultural inilah yang merupakan kewajiban moral sebagai konsekuensi non fisik dari masyarakat majemuk (*plural sosciaty*) sebagai perwujudan dari ideologi multikultural (Alqadrie, 2009 p 18). Kesadaran akan hubungan seseorang dengan orang lain di luar pandangan dirinya yang kemudian memengaruhi tindakan dan perilakunya terhadap berbagai masalah global baik di tingkat lokal maupun nasional (Watson, 2013 p 112). Maka dari itu, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis energi, perdamaian dunia, dan sebagainya maka dengan sendirinya akan mempengaruhi pandangan mereka secara nasional (Komarudin 2015 p 175). Akan tetapi sebaliknya jika berbagai isu-isu global di atas tidak dibelajarkan pada mahasiswa, maka memungkinkan akan memberikan persepsi negatif terhadap berbagai isu serta memicu terjadinya konflik.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Medan karena memiliki karakteristik sebagai masyarakat multikultural. Hal ini kemudian sejalan dengan tujuan penelitian dan pengembangan yang dilakukan serta upaya memperkuat proses pembelajaran PKn yang selama ini belum memperhatikan pengembangan kompetensi kewarganegaraan global. Selain itu melalui proses pengamatan yang dilakukan, bahwa pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi di Kota Medan masih cenderung bersifat konservatif sehingga kurang membangun aspek afektif dan psikomotorik mahasiswa sebagai bagian dari warga dunia.

Padahal PKn sebagai bagian dari pendidikan nilai dan karakter bangsa, seharusnya mampu memperkuat kemampuan mahasiswa untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global sehingga dapat memahami, menghargai dan menerima perbedaan budaya (Cogan dan Derricott, 1998 dalam Budimansyah & Suryadi, 2008 p 40), yang merupakan inti dari multikulturalisme.

Berangkat dari kondisi di atas, maka dirasa perlu untuk membangun kompetensi kewarganegaraan global melalui model pengembangan pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural (MPPKnGM) di Perguruan Tinggi. Kebutuhan pendidikan kewarganegaraan global (PKnG) adalah tuntutan pembelajaran dari abad 21 saat ini. Khususnya dalam membangun pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai masyarakat global yang mampu memahami, menerima dan mentolerir perbedaan-perbedaan budaya yang lebih luas. Hal ini sebagai upaya untuk mengembangkan kewarganegaraan global yang aktif dan bertanggung jawab dalam diri mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat multikultural.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PKn di perguruan tinggi masih belum memuat pengembangan kompetensi kewarganegaraan global mahasiswa. Ada sejumlah indikasi terkait dengan kenyataan tersebut:

Pertama, kurikulum PKn belum secara maksimal memperkuat orientasi global mahasiswa. *Kedua*, tidak banyaknya kajian atau telaah berkaitan dengan PKn global di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan berbagai persepsi yang beragam. Hal ini yang kemudian menjadikan PKn global dipahami secara sempit dan terbatas. Padahal secara terus menerus dan berkesinambungan diperlukan mengembangkan batang tubuh keilmuan (*the body of knowledge* atau *the scientific boundary line*) PKn yang dapat memperkuat status keilmuannya (Winataputra, 2007 p 17). *Ketiga*, pembelajaran PKn terpaku pada isi dan kurikulum, sehingga pendidik tidak berani mengajarkan di luar konteks yang lebih luas, termasuk mengkaji isu-isu yang bersifat kontroversial. *Keempat*, gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya berkaitan respon terhadap isu kemanusiaan global, masih cenderung dipengaruhi oleh ikatan kultural atas persamaan etnis, ras dan agama. *Kelima*, perlunya penyadaran dalam diri mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam merespon berbagai masalah lingkungan yang mengancam kehidupan umat manusia dan

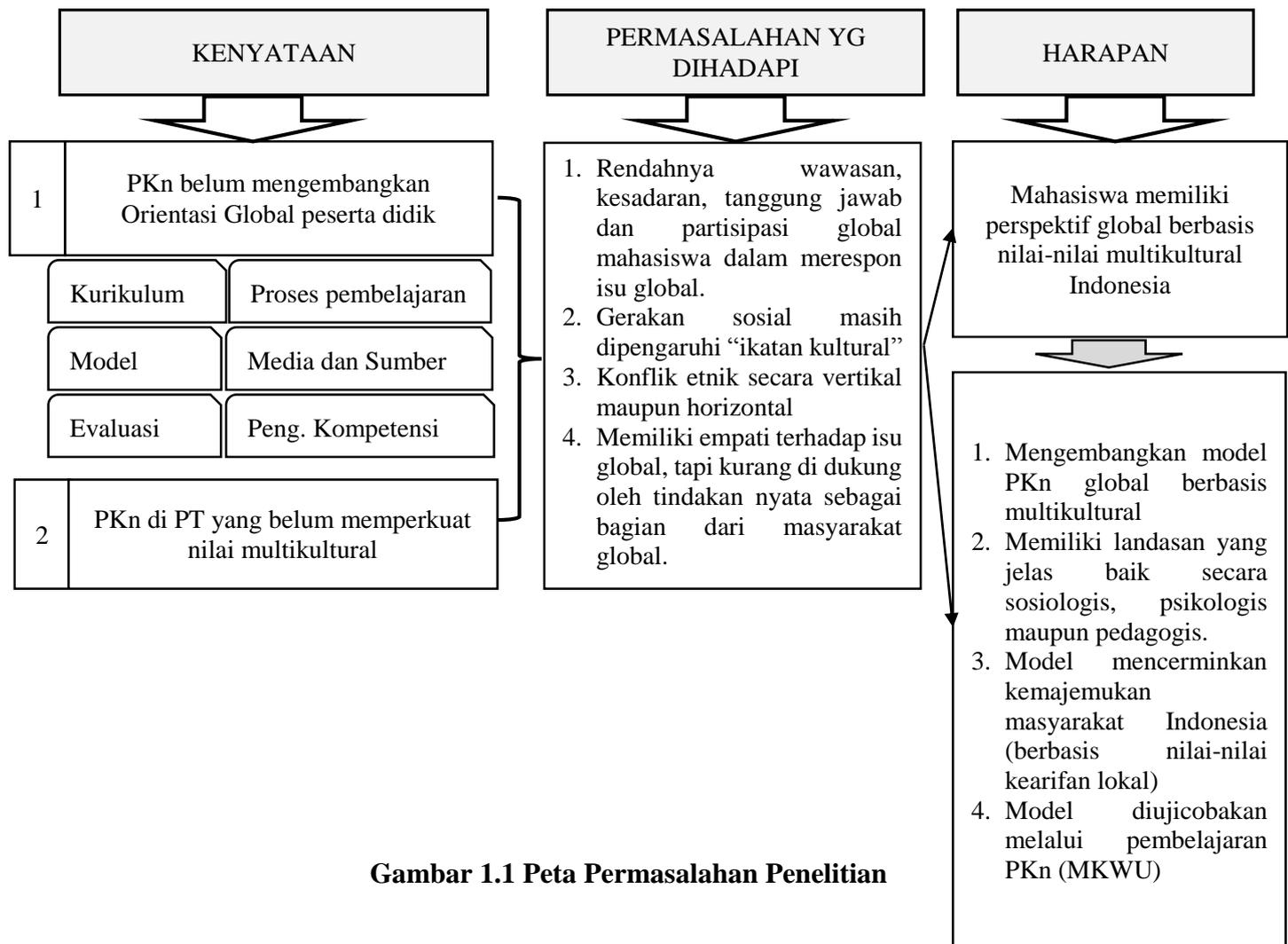
mahluk hidup lainnya baik saat ini maupun di masa yang akan datang. *Keenam*, globalisasi membawa dampak pada berbagai kehidupan umat manusia secara global, dan itu hanya dapat diselesaikan melalui gerakan global yang diperkuat melalui Pendidikan Kewarganegaraan baik di persekolahan maupun di Perguruan Tinggi. *Ketujuh*, Model ini dikembangkan sebagai upaya membangun kesadaran akan keragaman (multikultural) sebagai bagian dari warga global, yang saat ini belum dikembangkan secara optimal dalam diri mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini mengkaji “bagaimanakah pengembangan pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural (MPPKnGM) di perguruan tinggi ? Kemudian peneliti merinci rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung di perguruan tinggi selama ini di Kota Medan?
 - a. Bagaimanakah kondisi nyata pembelajaran PKn yang diterapkan di Perguruan Tinggi di Kota Medan selama ini?
 - b. Bagaimanakah pandangan atau pemikiran mahasiswa sebagai masyarakat multikultural di Kota Medan dalam merespon isu-isu global?
2. Bagaimana pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis Multikultural (MPPKnGM)?
 - a. Bagaimanakah Kerangka Konseptual Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis Multikultural (MPPKnGM) di Perguruan Tinggi ?
 - b. Bagaimanakah Pengembangan Kompetensi Global Berbasis Multikultural di Perguruan Tinggi ?
 - c. Bagaimanakah Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis Multikultural di Perguruan Tinggi ?
 - d. Bagaimanakah Pengembangan Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural di Perguruan Tinggi ?
 - e. Bagaimanakah Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis Multikultural di Perguruan Tinggi ?
 - f. Bagaimanakah Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis Multikultural di Perguruan Tinggi ?

3. Bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis Multikultural (MPPKnGM) di Perguruan Tinggi jika dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model konvensional?

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti mencoba menggambarkan peta permasalahan penelitian dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1.1 Peta Permasalahan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural (MPPKnGM) di Perguruan Tinggi yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan global. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kondisi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung di perguruan tinggi selama ini di Kota Medan yang mencakup:
 - a. Kondisi nyata pembelajaran PKn yang diterapkan di Perguruan Tinggi di Kota Medan selama ini.
 - b. Pandangan atau pemikiran mahasiswa sebagai masyarakat multikultural di Kota Medan dalam merespon isu-isu global.
2. Pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global Berbasis multikultural (MPPKnGM) yang mencakup:
 - a. Kerangka konseptual model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global berbasis multikultural (MPPKnGM) di Perguruan Tinggi.
 - b. Pengembangan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Global berbasis multikultural di Perguruan Tinggi.
 - c. Pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global berbasis multikultural di Perguruan Tinggi.
 - d. Pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global berbasis multikultural di Perguruan Tinggi.
 - e. Pengembangan media dan sumber belajar Pendidikan Kewarganegaraan Global berbasis multikultural di Perguruan Tinggi.
 - f. Pengembangan evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global berbasis multikultural di Perguruan Tinggi.
3. Efektivitas penerapan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Global berbasis Multikultural (MPPKnGM) di Perguruan Tinggi jika dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model konvensional.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara keilmuan (teoritis) maupun secara empirik (praktis).

1. Manfaat keilmuan (teoritis)

Penelitian ini akan menggali, mengkaji data, memberikan informasi serta menemukan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global berbasis multikultural untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan global. Dengan model pembelajaran ini

diharapkan menjadi sumbangan pemikiran penguatan peran mahasiswa sebagai bagian dari warga global.

2. Manfaat praktis

a. Para akademisi

Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi praktisi pendidikan bahwa PKn memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keragaman pada masyarakat multikultural. Peran tersebut bukan hanya pada tingkat lokal dan nasional saja melainkan tingkat global.

b. Para pengembang kurikulum PKn

Bahan kajian bagi pengembangan kurikulum PKn di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang memasukkan lebih eksplisit kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai bagian dari warga global. Kompetensi global yang akan dikembangkan bagi lulusan PKn bukan kompetensi kewarganegaraan kosmopolitan, akan tetapi kompetensi lulusan yang tetap memiliki nasionalisme dan identitas nasional bangsanya dengan memperkuat nilai-nilai multikultural.

c. Para pengambil kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi berupa kerangka konseptual tentang pentingnya kompetensi global di Perguruan Tinggi di Indonesia pada abad 21 melalui model pengembangan pembelajaran kewarganegaraan global berbasis multikultural. Untuk itu, penelitian ini menjadi bahan studi bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah tentang urgensi kesadaran global dimasukkan sebagai bagian kajian dalam mata kuliah PKn di perguruan tinggi.

d. Peneliti lanjutan

Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi abad 21 khususnya peneliti dalam bidang-bidang ilmu sosial.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini disusun secara sistematis sesuai dengan Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018. Disertasi ini terdiri atas 5 Bab, dimana setiap bab nya memiliki sub bagian sesuai dengan kajian di masing-masing babnya. Bab Pertama adalah Pendahuluan. Pada Bab ini terdiri atas lima bagian penting yakni (1) Latar Belakang Masalah; (2) Identifikasi dan Rumusan Masalah; (3) Tujuan Penelitian; (4) Manfaat dan Signifikansi Penelitian dan (5) Struktur Organisasi Disertasi. Pada Bab kedua mengkaji tentang Kerangka Teoritik yang terdiri atas berbagai teori-teori yang mendukung penelitian dan penulisan disertasi seperti (1) Pendidikan Kewarganegaraan Global dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; (2) Multikulturalisme Sebagai Bagian Sistemik Pendidikan Kewarganegaraan Global; serta (3) Kompetensi Kewarganegaraan Global. Selain itu di bab ini juga di kaji berbagai landasan teori, penelitian terdahulu serta paradigma penelitian.

Selanjutnya Bab Ketiga adalah Metodologi Penelitian. Terdiri atas (1) Pendekatan dan Metode Penelitian; (2) Prosedur Penelitian; (3) Lokasi dan Subjek Penelitian; (4) Defenisi Operasional; (5) Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data; (6) Proses Pengembangan Instrumen; (7) Teknik Pengumpulan Data; serta (8) Teknik Analisis Data. Pada bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada tiga bagian besar yang diuraikan pada bab ini, yakni (1) Deskripsi Lokasi Penelitian; (2) Deskripsi Hasil Penelitian serta (3) pembahasan hasil penelitian. Pada deskripsi lokasi penelitian di uraikan tentang lokasi dilaksanakannya penelitian ini. Sedangkan pada deskripsi hasil penelitian, maka diuraikan tentang hasil penelitian tahap studi pendahuluan, hasil penelitian tahap uji coba model, serta hasil penelitian pada tahap uji efektifitas model. Selanjutnya pada pembahasan hasil penelitian maka dikaji hasil yang diperoleh dari tiga tahapan studi pengembangan model yang dilaksanakan baik pada tahap studi pendahuluan, studi pengembangan maupun studi efektifitas. Di akhir penulisan disertasi ini adalah Bab 5 yang terdiri atas (1) Simpulan; (2) Implikasi dan (3) Rekomendasi. Simpulan dibagi menjadi dua bagian yakni simpulan umum serta simpulan khusus. Implikasi menguraikan dampak baik secara teoritis maupun praktis yang dihasilkan dari setiap simpulan penelitian. Sedangkan rekomendasi terdiri atas dua bagian yakni rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan, pengguna serta peneliti selanjutnya serta dalil-dalil yang dihasilkan dari penelitian ini.